



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KETAPANG  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS 2 (DUA) RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
BUPATI KETAPANG TAHUN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KETAPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Pasal 9 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat membentuk Panitia Khusus;
  - b. bahwa untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah diperlukan penelitian dan penyelesaian yang bersifat khusus, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tidak bisa dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditetapkan dikarenakan telah berakhirnya tahun anggaran 2023 dan jangka waktu pembahasan yang masih kurang;
  - c. bahwa untuk membahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, Tanggal 7 November 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang.



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



KETIGA : Raperda yang dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren;
2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023;

KEEMPAT : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja dan menyampaikan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang;

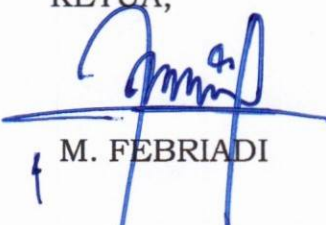
KEENAM : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Memperhatikan : 

1. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024 Dalam Rangka Mekanisme Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang;
2. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Ketapang Nomor : 40/SETDA-TAPEM.100/2024 tanggal 21 Maret 2024 perihal Penyampaian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023;
3. Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Ketapang Ketapang Nomor : 146/SETDA-HUKUM.100.3.2/2024 tanggal 25 Maret 2024 perihal Penyampaian Raperda untuk dilakukan pembahasan;

Ditetapkan di Ketapang  
pada tanggal 25 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
KETUA,

  
M. FEBRIADI

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2024, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 117);
9. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 86 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2023 Nomor 86);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2019 Nomor 49).

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU : Mencabut Keputusan DPRD tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023, Tanggal 7 November 2023;
- KEDUA : Membentuk kembali Panitia Khusus Pembahas 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ketapang Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;

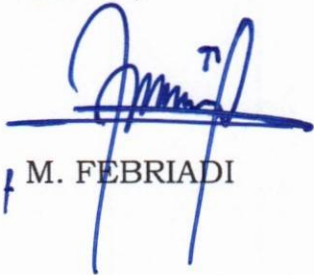


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS I PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :  
1. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;

| NO  | NAMA                  | UNSUR           | KEDUDUKAN<br>DALAM PANSUS       |
|-----|-----------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1   | 2                     | 3               | 4                               |
|     |                       |                 |                                 |
| 1.  | H. MAT HOJI, SE       | GERINDRA        | Wakil Ketua<br>DPRD/Koordinator |
| 2.  | JAMHURI AMIR, SH      | HANURA-DEMOKRAT | Wakil Ketua<br>DPRD/Koordinator |
| 3.  | FATHOL BARI, SH       | NASDEM          | Ketua/Anggota                   |
| 4.  | SUYANTO,S.IP          | GOLKAR          | Wk. Ketua/Anggota               |
| 5.  | RIYAN HERYANTO        | GERINDRA        | Sekretaris/Anggota              |
| 6.  | HERY SUSANTO, A.Md    | GOLKAR          | Anggota                         |
| 7.  | M. PUADI, S.Si        | GOLKAR          | Anggota                         |
| 8.  | ISMANTO, S.Pd         | PDIP            | Anggota                         |
| 9.  | SUSILIA ISABELA, A.Md | PDIP            | Anggota                         |
| 10. | TINI, SE              | HANURA-DEMOKRAT | Anggota                         |
| 11. | SUPRIANTO, SH         | HANURA-DEMOKRAT | Anggota                         |
| 12. | SUFANDA, ST           | NASDEM          | Anggota                         |
| 13. | MUSYAWIRI             | PPP             | Anggota                         |
| 14. | H. UTI WASKITO, S.Kom | PPP             | Anggota                         |
| 15. | SURYANTO, AR, SH      | PAN             | Anggota                         |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
KETUA,

  
M. FEBRIADI

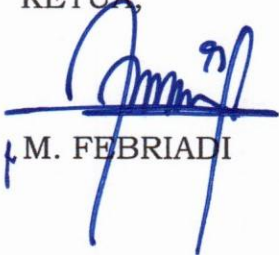
LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS II PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

| NO  | NAMA                        | UNSUR           | KEDUDUKAN<br>DALAM PANSUS       |
|-----|-----------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1   | 2                           | 3               | 4                               |
| 1.  | H. SUPRAPTO, S.Pd.,MM       | PDIP            | Wakil Ketua<br>DPRD/Koordinator |
| 2.  | GUSMANI, SE, SM             | GOLKAR          | Ketua/Anggota                   |
| 3.  | SYAIDIANUR, S.Pd.,M.Pd      | NASDEM          | Wk. Ketua/Anggota               |
| 4.  | KURNIAWAN, SH               | PDIP            | Sekretaris/Anggota              |
| 5.  | POLONIUS POLO, SH           | GOLKAR          | Anggota                         |
| 6.  | THOMAS FERLYAN, S.IP.,M.Sos | GOLKAR          | Anggota                         |
| 7.  | ARDANI FAUZI, SE            | GOLKAR          | Anggota                         |
| 8.  | ELISABET                    | PDIP            | Anggota                         |
| 9.  | MUHAMMAD RIJAL              | GERINDRA        | Anggota                         |
| 10. | ABDUL AEN                   | GERINDRA        | Anggota                         |
| 11. | YANG KIM, S.Pd.,MM.Pd       | HANURA-DEMOKRAT | Anggota                         |
| 12. | JHONNY HENDRAWANTO, A.Md    | NASDEM          | Anggota                         |
| 13. | H. ABDUL SANI, SH.,MM.M.Kn  | PPP             | Anggota                         |
| 14. | USMAN DIYANTO               | PAN             | Anggota                         |
| 15. | ELMANTONO                   | PAN             | Anggota                         |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
KETUA

  
M. FEBRIADI

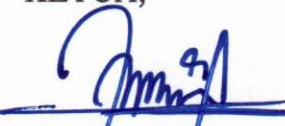


LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS III PEMBAHAS RAPERDA TENTANG :  
1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Ketapang Tahun 2023;

| NO  | NAMA                               | UNSUR           | KEDUDUKAN<br>DALAM PANSUS |
|-----|------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| 1   | 2                                  | 3               | 4                         |
| 1.  | M. FEBRIADI, S.Sos.,M.Si           | GOLKAR          | Ketua<br>DPRD/Koordinator |
| 2.  | ACHMAD SHOLEH, ST.,M.Sos           | GOLKAR          | Ketua/Anggota             |
| 3.  | ANTONI SALIM, SH                   | PDIP            | Wk. Ketua/Anggota         |
| 4.  | AKIM                               | GERINDRA        | Sekretaris/Anggota        |
| 5.  | MIA GAYATRI, SE                    | GOLKAR          | Anggota                   |
| 6.  | HENDRI WIJAYA                      | GOLKAR          | Anggota                   |
| 7.  | UTI ROYDEN TOP                     | GOLKAR          | Anggota                   |
| 8.  | YAKOBUS DINGUM SUDI YANTO,<br>A.Md | GOLKAR          | Anggota                   |
| 9.  | KASDI, S.IP.,SH                    | PDIP            | Anggota                   |
| 10. | SAMUEL                             | GERINDRA        | Anggota                   |
| 11. | AMANTUS SUMARNO,SE                 | HANURA-DEMOKRAT | Anggota                   |
| 12. | H. MAT ARI                         | HANURA-DEMOKRAT | Anggota                   |
| 13. | IRAWAN                             | NASDEM          | Anggota                   |
| 14. | SUKARDI                            | PPP             | Anggota                   |
| 15. | MOHTAR                             | PAN             | Anggota                   |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KETAPANG  
KETUA,

  
M. FEBRIADI